

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Deskripsi Lokasi Penelitian**

###### **a. Letak dan Luas Wilayah**

Secara geografis, Kabupaten Klaten terletak di antara 110°30'-110°45' Bujur Timur dan 7°30'-7°45' Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Klaten mencapai 665,56 km<sup>2</sup>.

Wilayah Kabupaten Klaten berbatasan dengan beberapa Kabupaten :

Sebelah Utara	:	Kabupaten Boyolali
Sebelah Timur	:	Kabupaten Sukoharjo
Sebelah Selatan	:	Kabupaten Gunungkidul (DIY)
Sebelah Barat	:	Kabupaten Sleman (DIY)

Letak Kabupaten Klaten cukup strategis karena berbatasan langsung dengan Kota Surakarta, yang merupakan salah satu pusat perdagangan dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pelajar dan kota wisata. Sehingga dilihat dari letaknya tersebut, secara perekonomian Kabupaten Klaten cukup maju karena mendapat imbas dari kemajuan dari kedua kota tersebut.

Wilayah Kabupaten Klaten terbagi menjadi tiga daratan, yaitu dataran lereng gunung Merapi, membentang di sebelah utara meliputi sebagian kecil sebelah Utara wilayah Kecamatan

Kemalang, Karangnongko, Jatinom, dan Tulung. Di sebelah timur, dataran rendah membujur di tengah meliputi seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Klaten, kecuali sebagian kecil wilayah merupakan dataran lereng Gunung Merapi dan Gunung Kapur. Dataran Gunung Kapur yang membujur di sebelah Selatan meliputi sebagian kecil sebelah Selatan Kecamatan Bayat dan Cawas.

Luas wilayah Kabupaten Klaten terdiri dari lahan pertanian seluas 39.758 Ha, dan luas lahan bukan pertanian seluas 25.798 Ha. Untuk lahan pertanian terdiri dari lahan sawah seluas 33.374 Ha dan lahan bukan sawah seluas 6.384 Ha. Melihat keadaan alamnya yang sebagian besar adalah dataran rendah dan didukung dengan banyaknya sumber air maka daerah Kabupaten Klaten merupakan daerah pertanian yang potensial disamping penghasil kapur, batu kali dan pasir yang berasal dari Gunung Merapi.

Ketinggian daerah 3,72% terletak diantara ketinggian 0 - 100 meter di atas permukaan laut. Terbanyak 83,52% terletak diantara ketinggian 100 - 500 meter di atas permukaan laut. Sisanya 12,76% terletak diantara ketinggian 500 - 2.500 meter di atas permukaan laut.

b. Pembagian Administrasi



Gambar 3 : Peta Kabupaten Klaten

Kabupaten Klaten terdiri atas 26 kecamatan, yang dibagi lagi atas 53 desa dan 103 kelurahan. Ibukota Kabupaten ini berada di Kota Klaten, yang terdiri atas tiga kecamatan yaitu Klaten Utara, Klaten Tengah, dan Klaten Selatan. Kota Klaten dulunya merupakan kota administratif, namun sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, tidak dikenal adanya kota administratif, dan Kota Administratif Klaten kembali menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Klaten. Kecamatan di Klaten :

- 1) Bayat
- 2) Cawas
- 3) Cepur

- 4) Delanggu
- 5) Gantiwarno
- 6) Jatinom
- 7) Jogonalan
- 8) Juwiring
- 9) Kalikotes
- 10) Karanganom
- 11) Karangdowo
- 12) Karangnongko
- 13) Kebonarum
- 14) Kemalang
- 15) Klaten Utara
- 16) Klaten Tengah
- 17) Klaten Selatan
- 18) Manisrenggo
- 19) Ngawen
- 20) Pedan
- 21) Polanharjo
- 22) Prambanan
- 23) Trucuk
- 24) Tulung
- 25) Wedi
- 26) Wonosari

c. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Klaten pada tahun 2012 sebanyak 1.461.706 jiwa, dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 724.785 jiwa, dan perempuan sebanyak 736.921 jiwa. Penambahan penduduk sebanyak 150.685 jiwa, dengan Kepadatan penduduk 2.230 jiwa/km<sup>2</sup>.

Di samping itu, adanya pertambahan jumlah penduduk telah mengakibatkan terjadinya pertambahan jumlah Kepala Keluarga (KK). Pada tahun 2011 jumlah KK sebesar 349.631 KK, atau terjadi peningkatan jumlah Kepala Keluarga sebesar 1,19% bila dibandingkan dengan kondisi di tahun 2012 yang jumlahnya sebanyak 353.849 KK. Jumlah keluarga pra sejahtera mengalami penurunan sebesar 1,74% dari 69.243 KK pada tahun 2011 menjadi 68.039 KK pada tahun 2012, sedangkan keluarga KS III+ mengalami kenaikan sebesar 5,41% dari 12.048 KK pada tahun 2011 menjadi sebesar 12.737 KK.

Kecamatan dengan pertambahan penduduk terbanyak pada tahun 2012 adalah Kecamatan Jogonalan 9.815 jiwa, Kecamatan Bayat 9.803 jiwa, dan Kecamatan Wedi 9.005 jiwa, sedangkan jumlah pertambahan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Karangdowo 1.550 Jiwa, Kecamatan Polanharjo 2.416 jiwa dan Kecamatan Kebonarum 2.420 jiwa.

Dari sudut kepadatan penduduk, tertinggi berada di Kecamatan Klaten Tengah (5.276 jiwa/Km<sup>2</sup>), Kecamatan Klaten Utara (4.871 jiwa/Km<sup>2</sup>), dan Kecamatan Klaten Selatan (3.493 jiwa/Km<sup>2</sup>) sedangkan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Kemalang (800 jiwa/Km<sup>2</sup>), Kecamatan Karangnongko (1.557 jiwa/Km<sup>2</sup>), dan Kecamatan Manisrenggo (1.756 jiwa/Km<sup>2</sup>).

## 2. Deskripsi Umum Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perhubungan yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten terdiri dari:

- a. Seksi bidang angkutan
- b. Seksi bidang lalu lintas
- c. Seksi bidang teknik sarana dan prasarana
- d. Seksi bidang terminal dan perparkiran
- e. Seksi bidang komunikasi dan informasi

### 2.1 Visi dan Misi

Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten adalah:  
 “Terwujudnya lalu lintas dan angkutan jalan yang tertib, lancar, nyaman, aman merata di Kabupaten Klaten dalam kerangka sistem transportasi nasional serta meningkatkan terwujudnya kinerja komunikasi dan informatika yang handal dalam

mendukung pembangunan daerah yang *toto, titi, tentrem, kerto raharjo*”.

Untuk dapat mewujudkan Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten menetapkan Misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan pola transportasi pedesaan yang merata dan seimbang.
- b. Mewujudkan kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan.
- d. Meningkatkan keselamatan sarana transportasi.
- e. Membangun sistem komunikasi dan informatika di Kabupaten Klaten.

## 2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten menetapkan asumsi dan pilihan strategi dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Terwujudnya pemerataan pelayanan angkutan umum.
- b. Meningkatkan pelayanan angkutan umum.
- c. Meningkatkan fasilitas lalu lintas jalan.
- d. Meningkatkan sarana transportasi yang dalam kondisi teknis laik jalan.

- e. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat pemakai jalan terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan.
- f. Meningkatkan sistem komunikasi dan informatika sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Klaten.

Untuk mewujudkan tujuan yang ditetapkan Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten mempunyai sasaran sebagai berikut :

- a. Terwujudnya kemudahan pelayanan angkutan umum kepada masyarakat.
- b. Terwujudnya keseimbangan antara penyediaan dan permintaan akan jasa angkutan penumpang umum.
- c. Terwujudnya masyarakat pemakai jalan yang sadar akan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan.
- d. Terwujudnya sarana transportasi yang dalam kondisi teknis laik jalan.
- e. Terwujudnya peningkatan perekonomian masyarakat pedesaan.
- f. Terciptanya lalu lintas dan angkutan jalan yang lancar, tertib, aman dan nyaman.
- g. Terwujudnya penurunan tingkat pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan.



- h. Terwujudnya sistem komunikasi dan informatika yang handal di Kabupaten Klaten

### 2.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten akan mewujudkan sistem transportasi yang handal, berkemampuan tinggi dalam menciptakan dan meningkatkan mobilitas manusia, barang dan jasa guna mendorong pengembangan wilayah dan meningkatkan kualitas pelayanan jasa perhubungan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan, ketertiban dan keselamatan lalu lintas jalan.

Strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten antara lain:

- a. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana jasa perhubungan, komunikasi dan informatika.
- b. Peningkatan fungsi sarana dan prasarana perhubungan, komunikasi dan informatika.
- c. Pengembangan jaringan pelayanan umum di kawasan pengembangan, pedesaan dan kawasan tertinggal.
- d. Peningkatan keselamatan lalu lintas angkutan jalan dan angkutan barang.
- e. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia perhubungan, komunikasi dan informatika.
- f. Peningkatan kesadaran penyelenggaraan angkutan jalan.
- g. Peningkatan ketertiban keamana dan keselamatan lalu lintas.

- h. Terciptanya iklim usaha jasa transportasi yang kondusif.

Kebijakan-Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten  
antara lain :

- a. Meningkatkan kapasitas pelayanan jasa perhubungan, komunikasi dan informatika.
- b. Meningkatkan aksesibilitas pelayanan angkutan umum.
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa perhubungan, komunikasi dan informatika.
- d. Peningkatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan jasa perhubungan, komunikasi dan informatika.
- e. Meningkatkan peran swasta dalam rangka peningkatan pelayanan jasa perhubungan, komunikasi dan informatika.

### 3. Deskripsi umum PT BUEP Klaten

PT Bangun Usaha Energi Perkasa (PT. BUEP) adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pembayaran online dan telah memiliki lebih dari 5.000 mitra usaha dengan rata-rata transaksi perbulan mencapai lebih dari 3 juta pelanggan. PT Bangun Usaha Energi Perkasa berkomitmen untuk terus memberi solusi dan pelayanan yang terbaik dalam memenuhi kebutuhan mitra usahanya termasuk terhadap pelanggan langsung.

Visi PT BUEP yaitu menjadi pengelola jaringan kegiatan usaha *Payment Point Online Banking* (PPOB) yang mapan, inovatif dan kompetitif. Sedangkan misinya yakni memberikan kontribusi pada

masyarakat dalam pelayanan segala transaksi yg dibutuhkan dengan pelayanan prima.

KIPO (Kios Pembayaran Online/Loket Pembayaran Online) adalah merek dagang yang dimiliki PT. BUEP dengan latar belakang bisnis yang menangani pelayanan umum untuk transaksi pembayaran listrik, telepon, PDAM dan lain-lain yang tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur DI Yogyakarta, Bali, Lombok dan Sumbawa.

PT BUEP merupakan anak cabang dari perusahaan PT Jogja Digital. Di Jawa Tengah, pengelolaan MPLIK diserahkan kepada PT BUEP. Perusahaan ini memiliki dua divisi yaitu divisi PPOB dan divisi MPLIK. Kedua divisi ini dikepalai oleh kepala cabang yang membawahi koordinator cabang, DPA, dan admin.

#### 4. Program MPLIK Kabupaten Klaten

Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan adalah Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) yang bersifat bergerak untuk akses internet yang sehat, aman, cepat dan murah. MPLIK dan PLIK merupakan program Kementerian Komunikasi dan Informasi yang dikelola oleh Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI). Program ini dibiayai oleh *Universal Service Obligation*, yang berasal dari setoran 25 persen pendapatan kotor 10 perusahaan operator telekomunikasi. Setoran ini dialokasikan dalam Pendapatan Negara Bukan Pajak kemudian digunakan untuk membayar perusahaan pemenang tender. Program PLIK sudah lebih

dulu berjalan dan kemudian disusul oleh MPLIK sebagai solusi baru untuk mengatasi keterbatasan PLIK dalam hal mobilitas.

Program MPLIK di Kabupaten Klaten sudah berjalan sejak bulan Juni tahun 2011. PT Jogja Digital merupakan salah satu pemenang tender yang menjadi pengelola MPLIK di wilayah Jawa Tengah dan DIY. Namun, PT Jogja Digital berkantor pusat di Jakarta sehingga untuk keberadaan PT Jogja Digital di Kabupaten Klaten dan wilayah lain digantikan oleh PT BUEP (Bangun Usaha Energi Perkasa) sebagai anak cabang perusahaan PT Jogja Digital yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang pembayaran online dan masih dalam satu manajemen dengan PT Jogja Digital. Selama mengelola MPLIK di Kabupaten Klaten, PT BUEP Kabupaten Klaten mengalami perubahan manajemen pada tahun 2013.

Mobil Internet berjumlah delapan unit, namun dua unit kemudian ditempatkan di Kabupaten Boyolali atas kesepakatan bersama. Pembagian wilayah sasaran MPLIK sudah ditentukan oleh KOMINFO pusat yaitu Kecamatan Prambanan, Kecamatan Manisrenggo, Kecamatan Kemalang, Kecamatan Tulung, Kecamatan Gantiwarno, Kecamatan Wonosari dan Kecamatan Karangdowo.

Setiap mobil internet berisi enam unit laptop, satu perangkat audio, dan satu unit televisi. Ada satu mobil internet yang juga dilengkapi dengan *genset* dan satelit. Mobil Internet dijalankan oleh seorang *driver* dan satu orang operator di setiap mobilnya.

Saat ini, penggunaan MPLIK banyak digunakan sebagai alat pembayaran pajak online seperti PLN, PAM, Telkom dan lainnya. Selain itu MPLIK sudah tidak berada pada wilayah kecamatan yang sudah ditetapkan sebelumnya, namun berada di pusat-pusat kota.

## 5. Deskripsi Hasil Penelitian

Berikut ini merupakan hasil penelitian evaluasi pelaksanaan program MPLIK dilihat dari dimensi konteks, input, proses dan produk

### a. Dimensi Konteks

Dimensi konteks yaitu dengan melihat relevansi antara tujuan dan latar belakang program dengan visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten serta PT BUEP sebagai pengelola MPLIK.

Perencanaan merupakan tahapan awal pelaksanaan program. Penyelenggara harus mempersiapkan tujuan secara matang tahapan-tahapan yang perlu ditempuh dalam mencapai tujuan tersebut. Menurut bapak SD sebagai Kasi Komunikasi dan Informasi, perencanaan program MPLIK yang dilakukan tergolong sudah baik dan matang. Mengenai tujuan dari MPLIK tersebut yaitu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di daerah terpencil yang tidak dapat mengakses internet, selain itu juga mengedukasi masyarakat pelosok dengan memperkenalkan internet sebagai sarana untuk berkomunikasi.

“Perencanaannya sangat baik *mbak*. Itu kan anggaran besar. Tidak hanya anggaran, tapi manfaatnya juga besar. Memberikan akses internet pada masyarakat pelosok yang ada di klaten ini. Makanya, lokasinya pun juga yang pelosok-pelosok perbatasan. Masih banyak masyarakat pelosok belum kenal dengan internet. Apalagi orang-orang tua itu taunya kalau berkomunikasi ya lewat telepon apa hp.”(wawancara 20 Mei 2014)

Bapak SD juga menjelaskan, latar belakang pengadaan mobil internet ini adalah dalam rangka pemerataan pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi di seluruh Indonesia. Sasaran program ini adalah masyarakat atau warga yang tinggal di kawasan yang kesulitan akses internet. Warung internet yang berada di Klaten saat ini menurut bapak SD sudah jarang ditemui. Di Klaten kota warung internet sudah mulai tutup karena paradigma masyarakat kota yang sudah maju. Rata-rata masyarakat kota sudah beralih dengan menggunakan laptop dan modem atau *smartphone*. Sementara warung internet juga jarang ditemui di daerah pelosok.

Hal senada juga diungkapkan oleh saudara AG selaku koordinasi cabang MPLIK PT BUEP cabang Klaten

“.....tujuannya agar masyarakat terpencil tidak semakin terpencil *mbak*. Agar masyarakat pelosok itu juga dapat menikmati internet. *Kan* selama ini masyarakat pelosok yang jauh dari kota itu masih awam sama internet. Masih asing. Jadi MPLIK ini untuk masyarakat di wilayah terpencil” (wawancara 24 Mei 2014)

Dengan adanya program MPLIK, diharapkan dapat mengedukasi masyarakat terpencil dengan memperkenalkan internet melalui MPLIK serta dapat membuka akses informasi

selebar-lebarnya pada masyarakat pelosok yang selama ini memiliki keterbatasan dalam hal penerimaan informasi dan komunikasi.

Nantinya pelaksanaan program MPLIK akan dikelola pihak swasta. Untuk daerah Jawa Tengah, pengelola MPLIK yaitu perusahaan pemenang tender bernama PT Jogja Digital. Sementara itu, Dinas Perhubungan berperan dalam hal *controlling*. Untuk wilayah Jawa Tengah, program MPLIK akan dimulai pada tahun 2011 awal.

Dari uraian diatas, maka dapat dilihat bahwa perencanaan sudah dilakukan dengan baik. Tujuan dan sasaran program sudah dirumuskan secara jelas. Selain itu implementor atau pelaksana program memiliki peran masing-masing untuk mencapai keberhasilan program.

Program MPLIK memiliki relevansi dengan visi dan misi serta tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten. Dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten memiliki visi terwujudnya kinerja komunikasi dan informatika yang handal dalam mendukung pembangunan daerah yang *toto, titi, tentrem, kerto raharjo* dan misi membangun sistem komunikasi dan informatika di Kabupaten Klaten. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten adalah meningkatkan sistem komunikasi dan informatika sebagai wujud

pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Klaten. Sedangkan PT BUEP merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembayaran *online* (PPOB) yang memiliki kewajiban dasar melayani masyarakat. Tujuan ini relevan dengan program MPLIK yang dalam pelaksanaannya dapat melayani masyarakat luas.

Berdasarkan rangkuman dari visi dan misi serta tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten dan misi dari PT BUEP Klaten di atas menunjukkan adanya relevansi antara tujuan program MPLIK dengan tujuan yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten dan PT BUEP Klaten dimana tujuan tersebut dapat dikatakan tercapai apabila aspek input, proses dan produk terpenuhi.

Secara umum dapat dilihat bahwa aspek konteks menunjukkan adanya relevansi antara tujuan program MPLIK dengan tujuan Dinas perhubungan Kabupaten dan PT BUEP Klaten.

#### b. Dimensi Input

Analisis input meliputi analisis personal yang berhubungan dengan bagaimana penggunaan sumber daya yang tersedia, manajemen dan strategi yang harus dipertimbangkan untuk mencapai suatu program. Aspek input memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan suatu program. Oleh karena itu evaluasi input dalam hal ini mencakup dari segi ketersediaan sarana prasarana serta fasilitas yang akan mendukung ketercapaian suatu program.



Pemberian MPLIK tidak dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya. Hal ini diungkapkan oleh Bapak SD, Kasi bidang Komunikasi dan Informasi Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten

“.....dari sisi regulasi itu ya kami selaku kominfo disini tidak punya kewenangan apa-apa karena tidak ada aturannya. Tidak ada juklak juknisnya. Dan kita tidak diberi aturan. Sehingga *kasare tembung wong Jowo yo “sak polah tingkahe mobil MPLIK itu kita tidak berhak”*. Kecuali kalo ada selebar *entah* dua lembar kertas ada juklak juknisnya ada aturannya sebagai payung hukum kita, *kan* bisa. *Ooo mas pak* kamu harus *begini* *begitu* ada aturannya *lho*. Saya *nggak* bisa bicara kalo *nggak* ada aturannya. *Kalo* *nggak* ada aturannya? Saya bisa dibalik, *lho ngapain pak kamu?*. *Makanya* kita *nggak* bisa berbuat banyak. Jadi ketika Kementrian *ngebel* saya meminta laporan ya apa yang saya laporkan?”(wawancara 20 Mei 2014)

Saudara AG, koordinasi cabang PT BUEP Klaten juga mengungkapkan hal yang sama

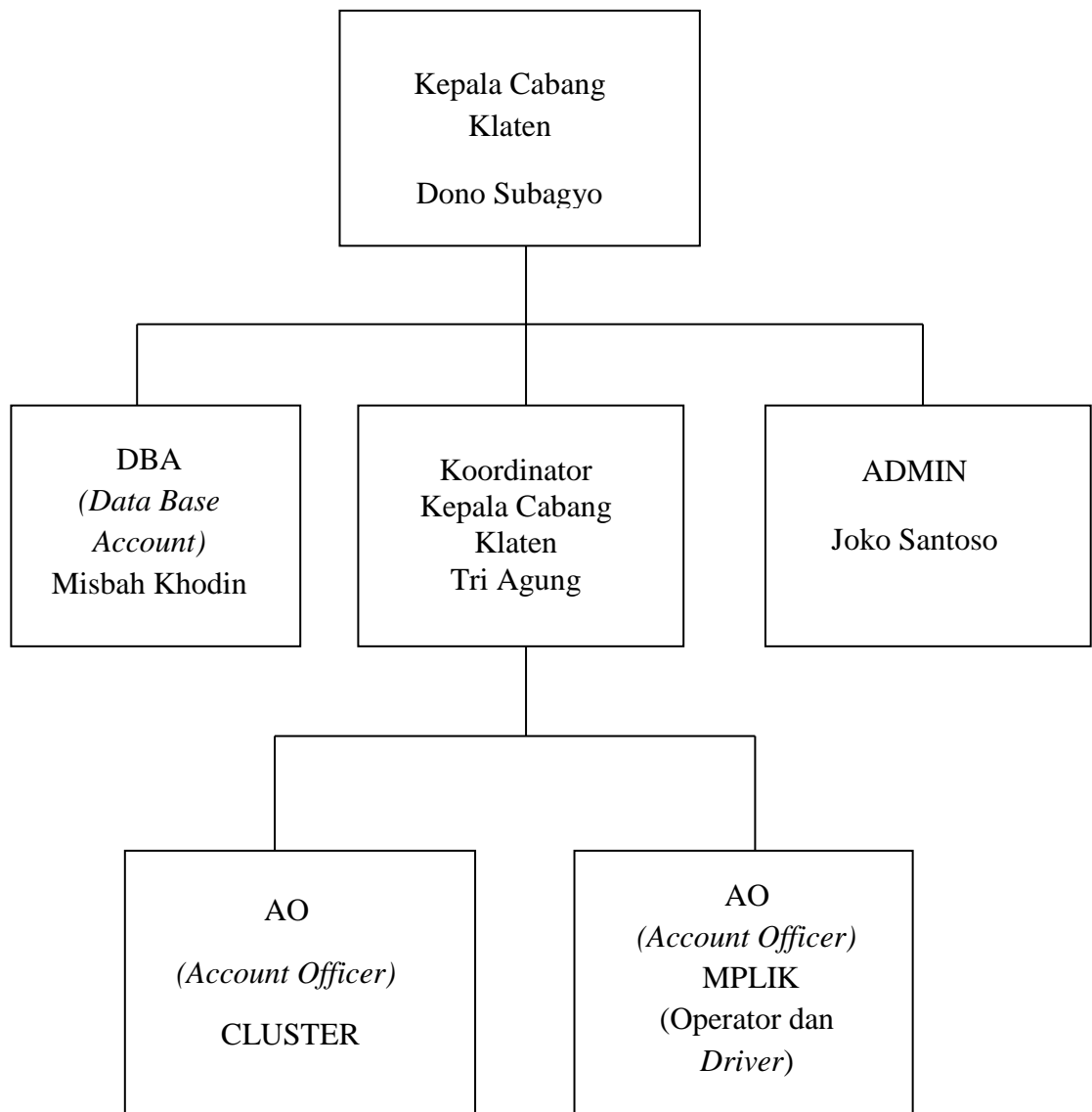
“.....yang diberikan bersamaan dengan mobil datang hanya ada buku panduan pengoperasian dan pemeliharaan MPLIK sama buku langkah-langkah konfigurasi V-SAT IP MPLIK. Buku-buku itu wajib dimiliki operator”(wawancara tanggal 24 Mei 2014)

Buku panduan pengoperasian dan pemeliharaan MPLIK berisi tentang panduan dasar penggunaan alat MPLIK termasuk dalam mengoperasikan dan memelihara mobil. Sedangkan buku langkah-langkah konfigurasi V-SAT IP berisi tentang tata cara penggunaan

laptop dan server serta penanggulangan masalah yang biasa terjadi pada *software* atau *hardware*.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa pemberian MPLIK disertai dengan buku panduan pengoperasian dan pemeliharaan MPLIK namun tidak disertai juklak dan juknis yang berisi aturan dan pedoman pelaksanaan. Hal tersebut membuat Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten tidak memiliki wewenang dalam melakukan *controlling*.

Struktur organisasi khusus MPLIK dibentuk oleh PT BUEP Kabupaten Klaten. PT BUEP Kabupaten Klaten memiliki dua divisi yaitu divisi PPOB dan divisi MPLIK. Divisi MPLIK mengalami perubahan manajemen pada tahun 2013 yang disebabkan oleh *resign* nya kepala cabang dan koordinator kepala PT BUEP cabang Klaten sebelumnya. Kemudian kepala dan koordinator PT BUEP cabang Klaten saat ini dipegang oleh kepala cabang dan koordinator Kabupaten Boyolali yang juga merangkap sebagai koordinator cabang Kabupaten Salatiga. Hal ini membuktikan bahwa sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pengelolaan MPLIK sangat terbatas, dan dampaknya dapat mempengaruhi keberlangsungan dan keberhasilan program. Berikut ini merupakan struktur organisasi PT BUEP Klaten divisi MPLIK :



Gambar 4. Struktur Organisasi PT BUEP Klaten divisi MPLIK

Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, struktur organisasi dengan pembagian tugas khusus yang dibentuk untuk MPLIK tidak dilakukan. Bapak SD, Kasi bidang kominfo Kabupaten Klaten mengungkapkan

“.....kami tidak ada struktur khusus untuk menangani MPLIK itu *mbak, wong* kami ini tidak memiliki wewenang apa-apa. *Nggak* ada aturannya *gini kok*. Kami ini *nggak* punya peran apa-apa”(wawancara 20 Mei 2014)

Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa struktur organisasi yang dibentuk khusus untuk MPLIK hanya dibentuk oleh PT BUEP Klaten. Pada divisi MPLIK PT BUEP Klaten, terbagi atas kepala cabang, koordinator cabang, admin, dan operator MPLIK. Namun fungsi masing-masing bagian dalam struktur organisasi ini tidak berfungsi dengan maksimal. Karena kepala cabang PT BUEP dan Koordinator cabang PT BUEP merangkap sebagai Kepala cabang dan koordinator cabang di Kabupaten Salatiga dan Boyolali. Sehingga fungsi kepala cabang dan koordinator cabang tidak maksimal dalam pelaksanaan tugasnya. Saudara AG mengungkapkan

“....kurang *mbak* SDM nya, saya dan pak Dn ini *kan* ditempatkan di cabang Klaten, Boyolali, dan Salatiga. kami domisilinya di Salatiga aslinya. Jadi kami tidak bisa setiap hari di kantor Klaten. Kalau ada keperluan atau permasalahan saja kami datang ke Klaten. Bisa seminggu sekali, bisa dua minggu sekali. Yang di kantor sini *cuma* ada admin. Jadi MPLIK kami limpahkan sepenuhnya ke operator. Kalau ada apa-apa nanti pasti *kan* operator lapor, baru nanti saya kesini.” (wawancara 24 Mei 2014)

Pernyataan tersebut membuktikan bahwa Sumber Daya Manusia yang berada pada manajemen PT BUEP Klaten tidak mencukupi. Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan MPLIK ini juga dibuktikan dengan *resign* nya beberapa operator dan *driver* sehingga ada beberapa MPLIK yang hanya dijalankan oleh seorang *driver* yang merangkap sebagai operator. Hal ini diungkapkan oleh saudara Dd, operator MPLIK Kecamatan Prambanan

“saya *driver*, juga operator. *Driver* saya sebelumnya *kan resign*. Banyak yang sudah *resign*. Yang di kantor aja *kan dulu juga resign* mbak. Makanya manajemen yang baru ini *kan rollingan* darimana gitu. Pada *nggak* betah. Saya juga sebenarnya *nggak* betah” (wawancara 28 Mei 2014)

Tenaga kerja operator dan driver MPLIK dipekerjakan secara kontrak per tahunnya dan dapat diperpanjang masa kerjanya selama dibutuhkan.

Berikut ini adalah data pegawai MPLIK Kabupaten Klaten tahun 2014:

Tabel 3. Data Pegawai MPLIK tahun 2014

No	Nama (Sesuai KTP)	Jabatan	Tgl Masuk	No. KTP	Alamat
1	Nur Rohman	AO Operator	23-May- 11	3310161005790001	Ngablak Rt/Rw. 03/05 Jetis, Delanggu, Klaten
2	Jimmy Ari Wardhana	AO Operator	23-May- 11	3310241901810003	Margomulyo Rt/Rw. 01/11, Gergunung, Klaten Utara, Klaten
3	Galuh Herqa Fandra Rizky	AO Operator	23-May- 11	3310172410880001	Jeblongan Rt/Rw. 02/03 Ponggok, Polanharjo, Klaten
4	Jefri Permana	AO Operator	23-May- 11	3313110412920002	Jl. Salak 7 No. 164 Perumnas Ngringo, Jaten, Karanganyar
5	Sri Wulandari	AO Operator	2-Jul-12	3313114110860003	Jl. Sawo 7 No. 142 Rt/Rw. 001/019 Ngringo, Jaten, Karanganyar
6	Catur Jaka Susila	AO Operator	1-Feb- 13	3310092805780001	Bubulan Rt 09/Rw 03 Taskombang, Manisrenggo, Klaten
9	Vincentius Nudityo	AO Driver	27-Jul- 11	3310252201820002	Perum Graha Cendana Blok B/6 Cantelan, Ketandan, Klaten Utara
10	Dwi Sihono	AO Driver	27-Jul- 11	3310180305720001	Tanjunganom Rt/Rw. 01/02 Karangan, Karanganom, Klaten
11	Trihono Saroso	AO Driver	27-Jul- 11	3310060801720001	Ketandan Rt/Rw. 01/03 Wonosari, Trucuk, Klaten
14	Dedi Hermanto	AO Driver	1-Oct- 11	3310092811760001	Gotakan Rt/Rw. 03/05 Kranggan, Manisrenggo, Klaten

Sumber: Data pegawai MPLIK PT BUEP Klaten 2014

Kurangnya sumber daya manusia menjadi hambatan dalam pelaksanaan program MPLIK. Koordinator MPLIK di Kabupaten Klaten yang merangkap sebagai koordinator MPLIK di Kabupaten Boyolali dan Salatiga merupakan bukti bahwa Sumber Daya Manusia sangat minim. Keterbatasan sumber daya manusia tentunya berpengaruh terhadap keberhasilan dan keefektifitasan program. Sehingga dalam pelaksanaannya, pengendalian MPLIK diserahkan sepenuhnya kepada operator karena manajemen PT BUEP tidak mampu mengakomodir seluruh MPLIK.

Pegawai MPLIK yang terbagi atas operator dan *driver* dapat dikatakan kompeten di bidangnya. Karena dalam hal perekrutannya, PT BUEP mensyaratkan pegawai yang kompeten di bidang TI dan untuk *driver* PT BUEP Klaten mensyaratkan memiliki SIM A. Dengan merekrut pegawai yang kompeten di bidangnya, diharapkan dapat menunjang keefektifan program MPLIK di Kabupaten Klaten. Nantinya dalam satu mobil akan ada satu *driver* dan satu operator. Saudara AG mengungkapkan

“semua operator MPLIK berpengalaman di bidang TI, karena pada waktu perekrutannya, operator MPLIK syaratnya harus dari TI atau minimal pernah kursus komputer. Kalau tidak punya pengalaman di bidang komputer *kan* nanti malah repot”(wawancara 24 Mei 2014)

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh saudara W1, operator MPLIK Kecamatan Klaten Kota

“.....ya dulu waktu saya ngelamar jadi operator syaratnya harus *ngerti* banyak soal komputer. Semua operatornya pada pengalaman di bidang TI *kok mbak*. Saya juga lulusan TI”(wawancara 27 Mei 2014)

Dalam hal sarana dan prasarana dan fasilitas yang diberikan KEMKOMINFO dan PT BUEP secara keseluruhan sudah memadai. Diantaranya yaitu enam unit laptop, VSAT, TV, GPS dan radio *tape*. Untuk kepentingan pembayaran *online*, tiap MPLIK juga dilengkapi dengan printer. Namun sarana prasarana dan fasilitas ini tidak maksimal dalam pemanfaatannya. Laptop hanya dapat dinyalakan sebanyak dua buah saja. Hal ini dikarenakan buruknya koneksi internet dan membuat daya *loading* internet menjadi lama apabila seluruh laptop dinyalakan. Meskipun upaya dengan menambah modem eksternal sudah dilakukan, namun pemanfaatan tetap belum maksimal. Sehingga membuat pemanfaatan sarana prasarana dan fasilitas menjadi tidak efektif. Terkait dengan permasalahan fasilitas dan sarana prasarana yang terjadi dalam pelaksanaan MPLIK menurut saudari Wladalah koneksi internet yang buruk.

“sarana prasarana sama fasilitasnya udah lengkap ya paling masalah koneksi internet *mbak*, sudah dikasih modem tapi tetap saja *lemot*. Biasanya laptop yang saya hidupkan *cuma* dua. Kalau semua laptop hidup sama sekali *nggak* jalan koneksinya”(wawancara 27 Mei 2014)



Hal senada juga diungkapkan saudara Dd

“kalau fasilitas yang tersedia lengkap ya mbak, ada TV ada radio juga. Masalahnya paling koneksinya lambat. Apalagi kalau yang hidup laptopnya lebih dari dua. Ya mau gimana lagi, kalau internetnya *lemot* biasanya *tak suruh* antri pakai laptopnya satu-satu” (wawancara 28 Mei 2014)

Dari pemaparan di atas, maka dapat diketahui bahwa aspek input pelaksanaan program MPLIK tidak semuanya terpenuhi. Tiga indikator yang tidak terlaksana adalah pertama pada pemberian MPLIK yang tidak disertai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Kedua struktur organisasi dengan pembagian tugas tidak dibentuk oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten. Ketiga Sumber Daya Manusia tidak mencukupi.

c. Dimensi Proses

Dimensi proses dalam pelaksanaan program MPLIK dibagi dalam komponen persiapan, sosialisasi, pelaksanaan, dan pemanfaatan dana.

Pelaksanaan suatu program merupakan suatu tahapan kebijakan publik yang akan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan dimana tujuan, faktor penghambat dan dampak kebijakan dapat dihasilkan. Dalam tahap pelaksanaan atau implementasi, terdapat unsur pelaksana atau implementor kebijakan yang berpengaruh untuk menentukan keberhasilan program. Dalam hal ini bidang komunikasi dan informasi Dinas

Perhubungan Kabupaten Klaten dan PT Jogja Digital yang terbagi atas PT BUEP dan operator.

Pelaksanaan tahap awal yaitu persiapan pelaksanaan. Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten bidang komunikasi dan informasi menghadiri rapat yang diadakan di Semarang. Dalam rapat tersebut juga dihadiri oleh perwakilan-perwakilan dari Dinas Perhubungan dari seluruh Kabupaten yang berada di Jawa Tengah. Pertemuan tersebut berlangsung satu kali pada bulan April tahun 2011.

Mengenai persiapan tersebut, bapak SD mengungkapkan

“.....setelah sampai disana itu sudah ada surat dari Kementrian KOMINFO yang menjelaskan *plottingnya*. Jadi wilayahnya sudah dibagi dari sana. Itu Kabupaten Klaten diberi delapan buah MPLIK beserta laptop-laptop nya itu, tapi yang dua mobil akhirnya ditempatkan di Boyolali, jadi yang di Klaten itu ada enam” (wawancara 20 Mei 2014)

Kemudian Bapak JS menambahkan

“.....pertemuan tersebut bertujuan untuk menginformasikan bahwa akan ada program MPLIK dari Kementrian KOMINFO yang berbentuk internet berjalan atau mobil internet yang fungsinya agar masyarakat terpencil dapat mengakses internet. Nanti dalam pelaksanaannya MPLIK ini dikelola pihak ketiga. Kemudian dari sana sudah ditentukan Kecamatan mana saja yang akan mendapat fasilitas mobil ini. Kecamatan tersebut yaitu Prambanan, Manisrenggo, Kemalang, Gantiwarno, Wonosari dan Karangdowo. Dalam pertemuan tersebut ya hanya begitu saja dan hanya sekali itu *tok* pertemuannya” (wawancara 20 Mei 2014)

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa penentuan wilayah keberadaan MPLIK sudah ditetapkan dari pemerintah

pusat. Daerah-daerah yang disebutkan di atas memang merupakan wilayah pelosok, perbatasan dan dataran tinggi yang jauh dari pusat kota.

Dalam pemaparan tersebut juga dapat diketahui bahwa nantinya Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten tidak berperan langsung dalam pelaksanaan teknis program MPLIK. Program MPLIK akan dilimpahkan sepenuhnya kepada pihak ketiga selaku pengelola yaitu PT Jogja Digital atau PT BUEP yang ada di Kabupaten Klaten.

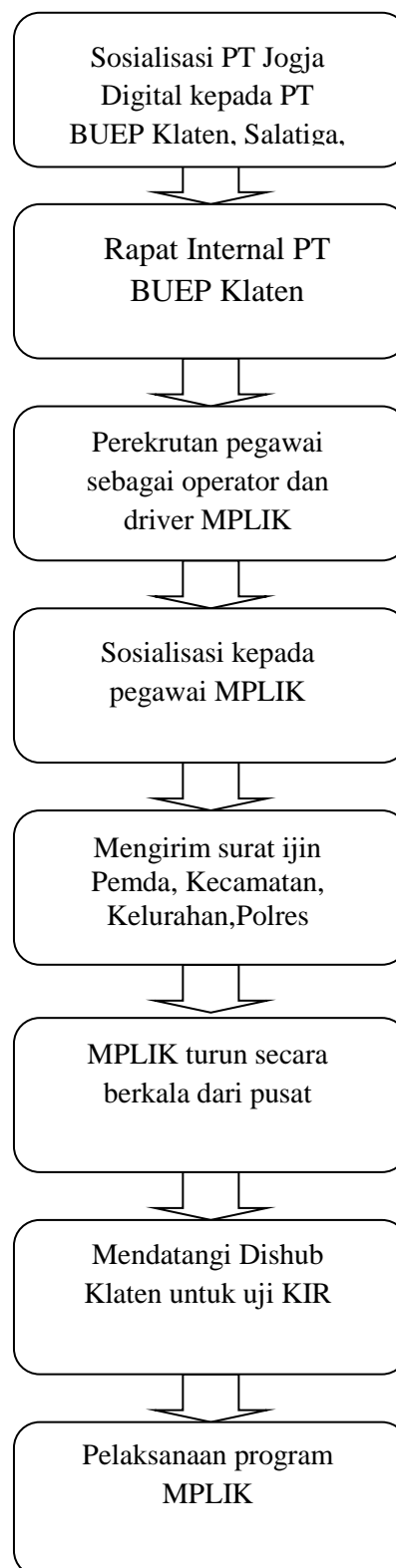
Pertemuan hanya dilakukan satu kali dan pihak Dishub Kabupaten Klaten tidak melakukan koordinasi dengan PT BUEP selaku pihak ketiga pengelola MPLIK. Hal tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten sebagai instansi pemerintah yang berkaitan erat dalam program MPLIK untuk ikut mengawasi atau mengontrol kegiatan MPLIK sesuai dengan visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten.

Bapak SD mengungkapkan

“dalam pertemuan tersebut juga dijelaskan ada pihak ketiga yang nantinya akan mengelola MPLIK tersebut, namun kami tidak dipertemukan dengan pihak ketiga. Jadi dalam pertemuan tersebut tidak ada pihak ketiganya hanya dihadiri perwakilan Dishub dari seluruh Kabupaten di Jawa Tengah, dan setelah pertemuan itupun kami juga tidak bertemu dengan pihak ketiga”(wawancara 20 Mei 2014)

Dari wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada persiapan khusus dari Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten. Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten hanya menghadiri rapat pertemuan yang diselenggarakan satu kali di Semarang untuk menerima informasi terkait program MPLIK. Persiapan juga tidak disertai dengan koordinasi antara pihak-pihak yang terkait. Sosialisasi juga tidak diselenggarakan oleh Dinas perhubungan Kabupaten Klaten.

PT BUEP sebagai perusahaan pengelola MPLIK melakukan berbagai kegiatan sebagai bentuk persiapan pelaksanaan MPLIK. Berikut ini mekanisme persiapan hingga pelaksanaan program MPLIK yang dilakukan PT BUEP Kabupaten Klaten :



Gambar 5. Mekanisme Persiapan Pelaksanaan MPLIK PT BUEP Klaten

Persiapan pelaksanaan yang dilakukan oleh PT BUEP yakni melakukan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh PT Jogja Digital pusat. Dalam rapat tersebut diinformasikan dan dijelaskan mengenai program MPLIK.

Saudara AG, koordinator cabang mengungkapkan

“.....persiapannya sudah bagus *kokmbak*, sebelumnya itu ada rapat yang diadakan oleh pusat, kami dari cabang Klaten, Boyolali, dan Salatiga berkumpul untuk diberi informasi dan gambaran nantinya akan mengelola MPLIK tersebut. Waktu itu lokasi rapatnya di Salatiga. kepengurusan juga dibentuk untuk masing-masing Kabupaten. Persiapannya seperti itu dulu”(wawancara 24 Mei 2014)

Kemudian dilanjutkan rapat internal PT BUEP Klaten yang berlangsung tiga kali di kantor cabang Klaten.

Bapak Dn mengungkapkan hal yang senada

“.....dirapatkan sama PT Jogja Digital pusat, lalu rapat lagi yang cabang Klaten di BUEP ini beberapa kali, tapi tiga kali yang rapat secara formal gitu *mbak*. Struktur organisasi ada dulu, terus karena pada *resign* ya sekarang tinggal saya dan mas AG yang *wira-wiri*.”(wawancara 24 Mei 2014)

Persiapan yang dilakukan PT BUEP sudah dilakukan dengan melakukan rapat beberapa kali. Setelah terjadi perubahan manajemen, koordinator MPLIK Kabupaten Klaten dipegang oleh saudara AG dan Bapak Dn yang juga merupakan koordinator MPLIK Kabupaten Salatiga dan Boyolali.

Selanjutnya, PT BUEP Klaten melakukan perekrutan pegawai yang kompeten di bidangnya yang akan ditempatkan pada posisi *driver* dan operator. Setelah perekrutan, para pegawai diberi sosialisasi mengenai tugas dan fungsi MPLIK. Hal ini seperti yang diungkapkan saudara AG

“dalam rapat menghasilkan kesepakatan, untuk melakukan perekrutan pegawai. pegawai untuk operator harus bisa komputer dan driver tentunya harus bisa nyupir. Lowongan kemudian kita sebar. Perekrutan pegawai tidak melalui seleksi yang *gimana-gimana* mbak soalnya dulu itu *keburu* mobil sudah pada datang, jadi sifatnya *urgent*” (wawancara 24 Mei 2013)

Lebih lanjut Bapak Dn menjelaskan

“.....perekrutan untuk posisi *driver* sama operator. Yang *driver* harus laki-laki yang bisa mengemudikan mobil, harus punya sim A yang masih berlaku, kalau sudah tidak berlaku ya kami suruh perpanjang dulu. Kalau operator latar belakangnya harus dari TI apa pernah kursus komputer. Lalu kami sosialisasikan mengenai tugas-tugasnya. Sehingga pegawai MPLIK ini semuanya berasal dari latar belakang TI yang baik” (wawancara 24 Mei 2014)

Saudari W1 sudah dua tahun bekerja sebagai operator MPLIK wilayah Klaten Kota. Dalam perekrutannya, saudara W1 dipekerjakan dengan diberi penjelasan mengenai tugas secara lisan oleh pihak PT BUEP.

“.....saya *nggantiin* operator sebelumnya kan pada *resign* itu. Yang baru-baru kerja itu *nggakliat lhombak* kerjanya ngapain, kerjanya *nggak* ada hitam di atas putih. Kalo yang waktu awal-awal itu kan pakai sosialisasi dijelasin, pakai hitam di atas putih. Kalo saya kemarin sama yang baru-

baru cuma ucapan lisan, besok mulai kerja, *bikin* rekening ini, tugasnya *gini-gini* ngelayanin internet di desa-desa terpencil nanti minta stempel dari kelurahan. Setiap hari pasti ada info. Kamu *kesini kesitu* ada kegiatan apa acara dimana. Ya kita langsung kesana” (wawancara 27 Mei 2014)

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa perekrutan pegawai selanjutnya tidak disertai dengan sosialisasi khusus, namun hanya pemberian tugas melalui lisan.

Operator dan *driver* tiap MPLIK bertanggungjawab dalam pemeliharaan alat-alat dan fasilitas yang berada dalam MPLIK dan memiliki kewajiban untuk selalu *online* melayani masyarakat minimal empat jam dalam sehari pada hari kerja.

PT BUEP Kabupaten Klaten juga melaksanakan persiapan dalam hal perijinan. Setelah melakukan perekrutan pegawai, PT BUEP Klaten mengirimkan surat sebagai bentuk perijinan yang ditujukan kepada tiap-tiap kecamatan serta kelurahan di Kabupaten Klaten, Pemerintah Daerah dan Polres. Perijinan dalam bentuk surat tersebut berisi mengenai penjelasan mengenai keberadaan program MPLIK, tujuan dan manfaatnya. Saudara AG mengungkapkan

“perijinan kami lakukan sebelum mobil turun. Perijinan itu dengan mengirimkan surat ke kecamatan, kelurahan, Pemda, Polres. Kami kirim surat kesana. Isinya sebagai pemberitahuan ya kalau akan ada MPLIK ini serta fungsinya seperti apa” (wawancara 24 Mei 2014)

Pendapat senada juga diungkapkan oleh Saudara Dd



“.....kirim surat dulu ke kecamatan, pemda sama Polres. Buat memberi tahu besok akan ada mobil internet. Kebetulan saya yang ngirim suratnya ke beberapa kecamatan sama kelurahan” (wawancara 28 Mei 2014)

Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan langsung oleh operator dan *driver* MPLIK. Namun sosialisasi yang dilakukan adalah dengan turun langsung ke jalan dan mengumumkan dengan menggunakan pengeras suara kepada masyarakat setempat. Saudara W1 mengungkapkan

“sosialisasinya sambil jalan mbak, pakai toa. Jadi di jalan-jalan kampung itu kita umumin pakai toa. Nanti kan pada denger, pada keluar rumah terus pada datang”(wawancara 27 Mei 2014)

Pendapat senada juga diungkapkan saudara AG

“ya kita melakukan sosialisasi mbak, ke warga itu sambil berkeliling. Kalau sosialisasi yang mengundang warga di suatu tempat itu kita tidak menyelenggarakan. Jadi sosialisasi sudah menjadi tugasnya operator MPLIK di lapangan”(wawancara 24 Mei 2014)

Dalam pelaksanaan MPLIK, rute wilayah atau lokasi penempatan MPLIK berbeda dengan rute atau wilayah yang sudah ditetapkan Kementrian KOMINFO sebelumnya. Saudara AG selaku koordinator cabang wilayah Klaten mengaku tidak tahu dengan adanya perbedaan rute tersebut. Ia hanya menjalankan program MPLIK sama dan sesuai dengan program MPLIK yang dijalankan oleh manajemen

sebelumnya. Sehingga dalam hal ini, MPLIK ditempatkan di wilayah Klaten Kota terdapat dua mobil, Pedan dua mobil, Tulung satu mobil dan Delanggu satu mobil. Seperti yang diungkapkan oleh saudara AG

“kami nggak tahu mbak soal perbedaan wilayah penempatan itu. Saya kan menggantikan yang sebelumnya. Yang sebelumnya soalnya ya disitu, waktu nggantikan sudah jalan. Dari dulu sampai sekarang penempatannya di Klaten kota ada dua, pedan ada dua, tulung satu, delanggu juga satu. Masing-masing MPLIK ada jadwalnya sendiri” (wawancara tanggal 24 Mei 2014)

Dari pemaparan di atas, hal tersebut merupakan akibat dari tidak adanya kerjasama dan koordinasi antara Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten dan PT BUEP sehingga terjadi ketidaksinergisan pelaksanaan program MPLIK.

Sementara itu bapak SD juga mengungkapkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten juga tidak mengetahui mengenai pembayaran pajak *online* yang menjadi kegiatan MPLIK Kabupaten Klaten saat ini.

“itu kami *nggak* tau malah buat bayar-bayar pajak. Sebelumnya waktu awal-awal dalam perencanaan ya *nggak* ada MPLIK buat bayar-bayar. MPLIK itu dari Kementrian KOMINFO, untuk warga masyarakat pelosok, untuk memberikan akses internet. Itu saja.” (wawancara 20 Mei 2014)

Pendapat Bapak SD diperkuat oleh pernyataan Bapak JS

“kami mendengar aktivitas MPLIK ini untuk pembayaran pajak *online*. Sebenarnya itu tidak pernah ada dalam rencana sebelumnya ya. Kami juga tidak tahu mengapa bisa

MPLIK beralih fungsi seperti ini. Sangat disayangkan memang”(wawancara 20 Mei 2014)

Pernyataan dari bapak SD dan bapak JSdi atas merupakan bukti bahwa pelaksanaan mobil MPLIK yang digunakan untuk pembayaran pajak PLN, Telkom, PAM melenceng dari tujuan program MPLIK. Kegiatan tersebut tidak direncanakan sebelumnya oleh Kementrian KOMINFO. Pelaksanaan program MPLIK tersebut melenceng dari tujuan utama, karena sudah beralih fungsi menjadi alat pembayaran pajak. Hal ini merupakan permasalahan krusial yang harus cepat ditemukan solusinya, karena menghambat keberhasilan tujuan utama program MPLIK itu sendiri.

Menurut saudara AG, penggunaan MPLIK yang digunakan sebagai alat untuk pembayaran pajak PLN, Telkom, PAM, dan lainnya merupakan sebuah strategi untuk mendapat perhatian dari masyarakat. Masyarakat yang membayar pajak di MPLIK memperoleh fasilitas untuk dapat mengakses internet secara gratis.

“kita memberi fasilitas pembayaran pajak *online* itu adalah merupakan suatu strategi untuk menarik perhatian masyarakat *mbak*. Dulu kita lihat peminatnya sedikit, kan nggak semua minat masyarakat terhadap MPLIK tinggi. Maka kita beri fasilitas itu untuk menarik minat masyarakat. Program ini tujuannya kan bagus ya *mbak* buat masyarakat terpencil. Tetapi pada saat kita turun ke masyarakat terpencil, beberapa masyarakat *malah* tidak tertarik dengan mobil mplik ini. Yang tertarik itu *malah* di

sekolah-sekolah. Kalau sekolah sering mengajukan proposal kesini minta kehadiran MPLIK ini. Kalau ada permintaan kami pasti layani” (wawancara 24 Mei 2014)

Namun pendapat tersebut berbeda dengan yang diungkapkan oleh Bapak Jk selaku admin PT BUEP Klaten

“sejak dulu MPLIK ini tugasnya selain untuk memberikan internet gratis juga untuk melayani pembayaran online. Sekarang yang jalan malah tinggal kegiatan melayani pembayaran saja. Melayani pembayaranpun sekarang ditarget tiap operatornya. Soalnya manajemennya berubah dan *udah nggak* ada anggaran dari pusat lagi”(wawancara 25 Mei 2014)

Pendapat Bapak Jk diperkuat oleh pernyataan saudari W1

“untuk bayar-bayar itu udah dari pertama kali, tapi yang benar-benar jadi ditarget udah setahun ini. Kalau dulu itu buat ini juga buat internet juga. Jadi dua-duanya jalan. Dulu itu bagus *mbak*, pengguna internetnya itu pada minat, anak-anak banyak. Kadang mau tutup *nggak* boleh. Kalau yang murni *nggak* jalan udah satu tahun terakhir itu. *Kan* udah jarang yang main. Jadi *kalo* ada orang yang minta tolong tetap dilayani. Biasanya anak-anak SD, sekolah-sekolah apa PNS yang *nggak* bisa main laptop, minta dibukain apa *gitu*” (wawancara 27 Mei 2014)

Penggunaan MPLIK sebagai alat pembayaran pajak online tersebut dari awal sudah dilaksanakan. Saudara AG juga mengungkapkan bahwa tidak ada regulasi yang melarang penggunaan MPLIK sebagai pembayaran online.

Saat ini MPLIK sudah berjalan sendiri dan bukan merupakan tanggung jawab PT Jogja Digital. Pengalihan fungsi MPLIK sebagai alat pembayaran pajak online bagi

masyarakat sebagaimana merupakan kegiatan usaha PT BUEP mengelola *Payment Point Online Banking*, memberikan tugas kepada tiap operator untuk mencapai target pendapatan. Sehingga saat ini MPLIK yang tersisa aktif tinggal tiga unit. Hal itu disebabkan karena ketidakmampuan operator dalam memenuhi target yang diberikan PT BUEP dalam hal pendapatan. Mobil yang sudah tidak aktif masih berada di garasi kediaman operator yang *menghandle*.

Sementara itu, terkait dengan beralih fungsinya MPLIK menjadi alat pembayaran pajak, saudara W1 menanggapi

*“kalo akunya sih, kan harusnya ikut dari Kementrian KOMINFO nya kan, dari PT Jogja Digitalnya itu. Tapi dari kantor nyuruhnya gitu ya mau gimana. Aku kan cuma kerja aja. Aku kalau ditanya ya bingung. Dulu pernah ada wartawan nanya ya tak jawab apa adanya. Katanya kalau ditanya itu kan terserah dari kita yang mengelola. Kita mau nebeng apa dan bagaimana itu udah terserah kita yang penting jalan”* (wawancara 27 Mei 2014)

Kesimpulan yang dapat diambil dari pemaparan di atas adalah dari awal MPLIK beroperasi, sudah ditumpangi dengan kegiatan pembayaran pajak secara *online* hingga sampai saat ini, yang membedakan adalah saat ini kegiatan untuk mengedukasi masyarakat hanya dilakukan bila ada permintaan. Sehingga penggunaan MPLIK melenceng dari tujuan utama program yang sudah direncanakan.

Indikator ketepatan pelaksanaan dalam komponen pelaksanaan tidak terpenuhi. Pelaksanaan MPLIK yang bertujuan memberikan akses internet kepada masyarakat di daerah terpencil beralih fungsi menjadi sarana pembayaran pajak online. Selain itu MPLIK sudah tidak berada pada rute yang sudah disepakati dalam perencanaan sebelumnya.

Pengawasan atau *controlling* dilakukan oleh BP3TI yang melakukan kunjungan rutin tiga bulan sekali dan pihak PT Jogja Digital pusat itu sendiri saat MPLIK masih menjadi bagian dari PT Jogja Digital. Sepeeti yang diungkapkan oleh saudara AG

“ada pengawasan mbak, dari PT Jogja Digital pusat sering kesini. Dari BP3TI juga ada. Banyak pihak yang melakukan pengawasan MPLIK ini. Biasanya tiga bulan sekali atau empat bulan sekali datang kesini”(wawancara tanggal 24 Mei 2014)

Pengawasan dilakukan oleh PT Jogja Digital pusat secara langsung.

Hal senada diungkapkan oleh saudara WI

“sudah tiga kali *mbak*, dari pusat, dari JD datang kesini. Itu aja kantor *nggak* tau. Soalnya *kan* mobilku ini nyala GPS nya. Jadi ketahuan *mbak* dari server. Dari pusat bisa tau mobil muter kemana aja. Udah tiga kali ini kok. Namanya kalau *nggak* salah mas Lilik” (wawancara 27 Mei 2014)

Sementara itu saudara Dd menambahkan

“pernah dua kali ini saya didatangi dari JD. Dua kali itu juga saya mengeluh *lho* mbak. Tapi ya *cuman* gitu aja. Cuma dilihat mobilnya sama ditanya-tanya. Yang lain juga didatangi tapi *wong* didatangi dicek tapi *nggak* ngerubah apa-apa kok *mbak*”(wawancara 28 Mei 2013)

Pengawasan sudah dilakukan langsung dengan inspeksi mendadak atau sidak yang dilakukan oleh PT Jogja Digital pusat. Pengawasan yang berlangsung selama tiga kali ini menurut saudari Wl dan Dd masih kurang maksimal. Menurut saudari Wl pengawasan dengan cara seperti itu bagus, mengingat mobil di wilayah lain banyak yang sudah tidak seaktif dulu misalnya suka terlambat dan tidak pernah berkeliling dan berpindah tempat. Sementara menurut saudara Dd, pengawasan yang dilakukan tidak ada tindak lanjut, sehingga hal ini sangat disayangkan.

Terkait laporan rutin yang seharusnya dilaporkan kepada bidang komunikasi dan informasi Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten sebagai instansi pemerintah yang harus turut mengontrol pelaksanaan MPLIK, menurut bapak JS seharusnya pihak pengelola memberikan laporan secara rutin kepada Dishub Klaten. Bapak JS sebagai Kepala Dishub Kabupaten Klaten mengatakan

“.....kami tidak tahu menahu soal pelaksanaannya seperti apa. Dari awal mobil turun kemudian dibawa *kemari* tahun 2011 awal, kemudian tatap muka dengan Kepala Dinas,

minta rekomendasi saja sama uji KIR dan langsung menuju ke lokasi. Laporan pun *ndak* ada *mbak*. Jadi sampai detik ini kami tidak pernah tahu pelaksanaannya seperti apa. Komunikasi sama sekali *nggak* ada” (wawancara 20 Mei 2014)

Bapak SD menambahkan

“.....saya tidak berani meminta laporan *mbak*, kami tidak diberi kewenangan untuk itu. Seperti yang dilakukan teman saya di kota C itu, Dishubnya minta laporan, ditekan terus, tapi ya berjalan baik, tapi saya tidak *mau* seperti itu nanti *malah* jadi pungli. Karena kan setiap laporan mereka juga setor”(wawancara 20 Mei 2014)

Tidak adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta aturan yang jelas menjadi alasan Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten untuk tidak melakukan pengawasan pelaksanaan program MPLIK. Sehingga dalam hal pelaksanaan program MPLIK Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten tidak memiliki peran apapun selain uji KIR yang dilakukan pada saat mobil turun untuk pertama kali.

Dari pernyataan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sumber daya manusia yang berada di Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten tidak berinisiatif dan berupaya untuk melakukan pengawasan secara mandiri. Padahal, dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 19/PER/M.KOMINFO/12/2010 menjelaskan bahwa antara pihak swasta dan pemerintah daerah Kabupaten terkait untuk bekerjasama untuk keberhasilan program. Selain itu visi



dan misi Dinas Perhubungan yaitu terwujudnya lalu lintas dan angkutan jalan yang tertib, lancar, nyaman, aman merata serta meningkatkan terwujudnya kinerja komunikasi dan informatika dalam mendukung pembangunan daerah dan membangun sistem komunikasi dan informatika di Kabupaten Klaten tidak terlaksana.

Menanggapi permasalahan mengenai komunikasi atau laporan yang sampai saat ini tidak pernah diterima oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, saudara AG mengatakan

“.....kita laporan setiap bulan sekali di akhir bulan. Kita laporan ke PT Jogja Digital pusat sebulan sekali. Dalam laporan itu isinya dalam sehari mobil ada dimana jam berapa. Itu kita laporkan sebulan sekali ke pusat. Jadi bukan kita *nggak* laporan, kita laporan *cuman* ke pusat.”(wawancara tanggal 24 Mei 2014)

Dalam pengoperasian MPLIK, operator dan *driver* memiliki tugas membuat laporan sebulan sekali untuk dilaporkan kepada PT BUEP. Laporan tersebut nantinya akan dilanjutkan ke PT Jogja Digital pusat sebagai laporan rutin MPLIK Kabupaten Klaten.

Saudara AG mengungkapkan bahwa laporan diterima dari operator setiap MPLIK per bulan dan oleh admin PT BUEP dilaporkan ke PT Jogja Digital pusat melalui *e-mail*. Laporan tersebut berisi tentang jadwal MPLIK berkeliling, berapa jam, dan dimana MPLIK tersebut berhenti. MPLIK harus

berkeliling ke wilayah sasaran minimal empat jam dalam satu hari.

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa pelaksanaan MPLIK pada indikator laporan rutin dan monitoring tidak terpenuhi. MPLIK dalam pelaksanaannya tidak termonitor secara baik. Monitoring seharusnya dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten sebagai institusi pemerintahan yang berkaitan erat dengan pengadaan MPLIK, namun dalam faktanya Dinas Perhubungan sama sekali tidak melakukan monitoring. Monitoring dilakukan oleh PT Jogja Digital itu sendiri. Namun, setelah MPLIK berjalan secara mandiri tidak ada lagi pihak yang memonitor pelaksanaan MPLIK. Pelaksanaan MPLIK di lapangan diserahkan kepada operator.

Jadwal MPLIK berkeliling pada hari senin hingga sabtu. Hari minggu dan hari besar MPLIK tidak beroperasi. Minimal MPLIK beroperasi empat jam dalam satu hari. Pengendalian di lapangan diserahkan sepenuhnya kepada operator dan setelah selesai berkeliling, mobil di garasikan di rumah *driver* atau operator. Sehingga dalam pelaksanaannya antara operator dan *driver* MPLIK jarang mendatangi kantor PT BUEP dan bertatap muka dengan koordinator MPLIK.

Saudara Wl mengungkapkan

“kalau mobilku ini aktif mbak, biasanya warga ada yang hafal aku setiap hari apa dimana gitu. Kalau yang lain itu suka pada telat. Malah banyak yang sudah nggak aktif lagi”(wawancara 27 Mei 2014)

Saudara Dd menambahkan

“kalau waktu pelaksanaan semuanya tergantung operator masing-masing ya *mbak*, mobil yang saya bawa ini termasuk selalu tepat waktu pelaksanaannya sampai sekarang paling telat sejam dua jam. *Mending mbak* daripada yang *lainkan* sudah banyak yang males gara-gara sudah ditarget jadi mending nggak jalan lagi”(wawancara 28 Mei 2014)

Pendapat ini diperkuat oleh pernyataan Bapak Jk, admin PT

BUEP Klaten

“Saat ini MPLIK yang masih aktif hanya tiga unit dan pemanfaatannya untuk kegiatan pembayaran *online* saja. MPLIK yang lain sudah *ndongkrok* di garasi. Kalau masalah ketepatan waktu pelaksanaannya dulu tepat, masih hangat-hangatnya itu. Terus molor paling dua hari sekali terus lama-lama seminggu sekali terus *ndongkrok*. Yang masih aktif tiga unit ini”(wawancara 25 Mei 2014)

Seperti yang sudah dipaparkan di atas, saat ini MPLIK yang masih aktif hanya tiga unit. Waktu pelaksanaannya tidak selalu tepat waktu. MPLIK dalam pelaksanaannya dilapangan sudah dilimpahkan sepenuhnya menjadi tanggungjawab operator, sehingga pelaksanaannya fleksibel.

Sementara itu, evaluasi yang dilakukan PT BUEP terhadap operator MPLIK sudah jarang dilaksanakan semenjak

perubahan manajemen. Hal ini seperti yang diungkapkan saudari Wl

“dulu ada tiap bulan, rutin. Sekarang *nggak* pernah. Soalnya udah pada males. Semenjak ganti manajemen ini, jadi kitanya juga males mau kesana. Kalau *nggak* ada kepentingan kita *nggak* kesana. Kemaren diminta kumpul juga terus aku bilang *aja* kalau yang *datengcuma* tiga orang *kan* namanya curhat pak saya *nyeletukgitu aja*. Terus diundur” (wawancara tanggal 27 Mei 2014)

Hal senada juga diungkapkan saudara Dd

“sekarang *nggak* pernah *mbak* yang namanaya evaluasi apa koordinasi. *kan* kantor juga jarang ada orang *to*. Kalau disuruh kumpul ya kita kumpul, itu aja biasanya *nggak* lengkap, *nggak* semua mau disuruh kumpul. Jadi udah *nggak* pernah” (wawancara 28 Mei 2014)

Evaluasi yang seharusnya dilakukan secara rutin untuk memecahkan masalah-masalah sudah tidak pernah dilakukan sejak perubahan manajemen. Saudara Dd juga mengungkapkan bahwa setiap ada permasalahan atau kerusakan alat dalam MPLIK biasanya ia laporkan melalui pesan singkat atau sms, kemudian bila dapat diperbaiki sendiri maka akan diperbaiki sendiri.

Dalam komponen pemanfaatan dana, awalnya dana yang berasal dari PT Jogja Digital tersalurkan dengan baik. ada anggaran tersendiri untuk kebutuhan operasional MPLIK yang pemanfaatan dananya digunakan dengan baik. Namun semenjak lepas dari PT Jogja Digital, anggaran kebutuhan

operasional sudah tidak diberikan lagi. Para operator tidak lagi digaji oleh PT Jogja Digital pusat, namun dengan sistem pendapatan perhari yang kemudian dibagi. Pendapatan tersebut diperoleh dari pembayaran pajak yang terkumpul perharinya dikurangi dengan biaya operasional dan kebutuhan lain termasuk bensin. Bapak Jk, admin PT BUEP Klaten mengungkapkan

“Sekarang mobil masih dipegang tapi untuk rekening suruh buat sendiri-sendiri, jadi untuk *fee* nya kan masuk ke operator langsung. Dulu masuk ke PT BUEP semua. Sekarang karena dilepas, BBM beli sendiri, apa-apa cari sendiri, *ya udah nggak* ada anggaran dari sana, fasilitas memang belum dicabut. Dulu waktu masih dianggarkan dari JD dimanfaatkan dengan baik, sesuai dengan kebutuhan, ada anggaran untuk bensin, untuk perbaikan ini itu, untuk gaji pegawai dan lain-lain. Sekarang tergantung pendapatan masing-masing MPLIK. Lha itu kalau yang punya pelanggan banyak kaya mbak Wl apa pak Dwi itu kan pelanggannya seribu lebih, *kan* masihimbang dengan gaji yang dulu nggak terpaut jauh, kalau yang lain nggak ada pelanggan *kan ya* mending kabur. *Asline* kalo semua mau kaya pak Dwi mau *mutergitu* bisa, *ya* orangnya aja *sing males*. Kalau dulu masih ditanggung pusat istilah mobil jalan *nggak* jalan dapet gaji”(wawancara 25 mei 2014)

Pernyataan di atas didukung oleh pernyataan saudara Dd

“sekarang ini yang jalan pembayaran *online* nya. Soalnya kita ini jadi ditarget buat harus jalan pembayaran *onlinenya*. Dulu *nggak* gitu, MPLIK masih dalam *track* nya ya buat bayar juga kalau ada yang mau bayar. Sekarang yang aktif buat bayar-bayarnya. Penggajiannya juga udah beda nggak kaya dulu, sekarang dapetnya berapa ya gajinya itu berapa persennya aja”(wawancara 28 Mei 2014)

Saudari W1 menambahkan

“sekarang gajinya cari sendiri *mbak*. Dulu *kan* digajinya dari pusat *kan* nanti tanggalnya juga tepat. Sekarang *nggak*. Kita dapetnya ya dari ini. Dapetnya berapa nanti dikasih *feed* dari kantor, tapi bulanan itungannya. Itupun setiap tanggal sepuluh *mbak* baru dikasih. Kalau dulu masih layak, gajinya di atas UMR sini. Dapet bonus juga masuk ke gaji. Sekarang udah *nggakmbak*, makanya pada *nggak* jalan lagi”(wawancara 27 Mei 2014)

Setiap hari operator menyetor pendapatan dari hasil pembayaran pajak melalui transfer biro di BRI. Kemudian dari pendapatan tersebut operator mendapatkan *fee* yang dibayarkan tiap bulan.

Hal tersebut membuktikan bahwa saat ini dana operasional sudah tidak mencukupi. Pemanfaatan dana pada saat masih ada anggaran dari PT Jogja Digital digunakan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan. Kurangnya dana yang mencukupi membuat pelaksanaan MPLIK di Kabupaten Klaten tidak berjalan efektif.

Dari pemaparan mengenai pelaksanaan MPLIK oleh implementor di atas dapat dilihat bahwa pelaksanaan MPLIK jauh dari harapan. Berbagai permasalahan yang timbul tidak segera di atasi sehingga timbul permasalahan-permasalahan yang lain. Sehingga kesimpulan yang didapat terkait dengan semua indikator dalam komponen pelaksanaan tidak terpenuhi.

Pelaksanaan program MPLIK dapat dikatakan gagal dan dibutuhkan perbaikan.

d. Dimensi Produk

Dimensi produk merupakan penilaian yang dilakukan untuk melihat ketercapaian atau keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini, program MPLIK dapat dikatakan berhasil apabila masyarakat pelosok dapat merasakan manfaat program MPLIK dan akses internet dapat merata di wilayah Kabupaten Klaten.

Peneliti mewawancarai secara acak masyarakat di Kabupaten Klaten sebagai penerima layanan program MPLIK. Sy pelajar kelas 6 SD Negeri 1 Bareng Lor mengungkapkan keantusiasannya terhadap program MPLIK. Sy yang sedang menggunakan internet MPLIK Klaten kota mengungkapkan

“sering *mainan* disini sama teman-teman pulang Sekolah. Kalau nggak ada tugas disini download game, apa lagu. Tugas sekolah, tugas IPA kadang IPS kadang PKn”(wawancara 1 Juli 2014)

Hal tersebut senada dengan Rh, siswi kelas VII SMP N 1 Jatinom

“internetannya biasanya buka-buka *facebook*, *chatting* sama temen-temen, apa ngerjain tugas dari sekolah kalau ada tugas yang ngirimnya harus lewat *e-mail*. Kalau ada mobil ini disini mending *mainan* disini. Kalau pas nggak ada ngerjain PR nya di warnet”(wawancara 1 Juli 2014)

Saudari Stdi kecamatan Prambanan yang sedang melakukan transaksi pembayaran pajak listrik PLN mengungkapkan

“bayar listrik mbak, saya sudah sering bayar disini. Bayar di PLN nya langsung jauh. Ini kan sekalian lewat, habis dari pasar. Ya saya *sih seneng* mbak, mobilnya suka berhenti disini. Saya sudah tiga kali ini bayar disini”(wawancara 30 Mei 2014)

Pendapat lain yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Ty di Kecamatan Klaten Utara

“yang saya tau mobil ini *buat* bayar-bayar listrik sama PAM. Nggak tau kalau fungsi utamanya itu untuk memberikan layanan internet gratis. Kalau saya baru kali ini bayar listrik disini. Biasanya istri saya. Menurut saya lebih enak saja bayar disini, *nggak* perlu jauh-jauh, harganya juga sama *aja*. *Nggak* pernah bermasalah juga semenjak bayar listrik disini. Biasa saja”(wawancara 1 Juni 2013)

Sementara itu, warga di kecamatan Cawas bernama bapak Sb mengaku tidak mengetahui kehadiran MPLIK.

“*opo kui mbak? Ra ngerti. Nggak* pernah lihat sama sekali. Nggak pernah internetan, saya juga ndak tertarik. Palingan anakku yang bilang *pak e tumbaske* komputer. Kalau bayar listrik di PLN”(wawancara 2 Juni 2013)

Hal senada juga diungkapkan oleh saudari Fn, siswa SMP Muhammadiyah 1 Klaten

“*nggak tau tu mbak*, mobil yang mana *to? nggak* pernah lihat. Aku kalau internetan *nggak* pernah di warnet soalnya dirumah udah ada. Lewat HP juga bisa. Di sekolah juga ada *mbak*. Ke warnet paling cuma *ngeprint*”(wawancara 3 Juni 2013)

Dengan kehadiran MPLIK di Kabupaten Klaten, ternyata manfaat tidak dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Akses



teknologi informasi juga tidak merata. Masih banyak warga masyarakat yang masih buta akan internet. Beberapa masyarakat mengetahui kehadiran MPLIK hanya sebatas sebagai sarana pembayaran pajak online, sehingga mereka tidak mengetahui tujuan utama dari pengadaan MPLIK. Hal ini disebabkan oleh sosialisasi yang tidak maksimal. Sehingga pada dimensi produk indikator keberhasilan tidak tercapai. Oleh sebab itu dibutuhkan perbaikan dan solusi segala permasalahan yang ada.

e. Faktor Pendukung Pelaksanaan Program MPLIK

Faktor pendukung pelaksanaan program MPLIK seperti yang diungkapkan saudara AG, koordinator cabang PT BUEP Klaten

“faktor pendukung program ini adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakat merasa sangat terbantu dengan keberadaan MPLIK ini. Disamping memberikan akses internet secara gratis dan mudah, kami juga memberikan fasilitas dalam hal pembayaran pajak *online*. Jadi masyarakat merasakan manfaat MPLIK ini. Ya meskipun banyak juga animo masyarakat yang masih belum dapat menerima internet sebagai suatu kebutuhan. Tapi yang jelas faktor pendukung MPLIK ini ya masyarakat itu sendiri”(wawancara 24 Mei 2014)

Hal serupa juga diungkapkan oleh WI, operator MPLIK kecamatan Klaten Kota

“program ini faktor pendukungnya antusias masyarakat *sih mbak*, antusias anak-anak kecil malah. Tapi ya disamping itu internetnya lemot jadi pada males. Sekolah-sekolah kan sering minta didatangkan, minta diajarin. Alhamdulillah ya pada senang” (wawancara 27 Mei 2014)

Dari pernyataan diatas tersebut maka faktor pendukung pelaksanaan program MPLIK adalah masyarakat. Masyarakat khususnya dari institusi pendidikan memberikan respon yang positif terhadap keberadaan MPLIK. Selain itu secara tidak langsung fasilitas tambahan yang diadakan oleh PT BUEP yaitu pembayaran pajak secara *online* juga mendukung keberadaan MPLIK meskipun dalam faktanya penggunaan MPLIK sebagai alat pembayaran pajak *online* melenceng dari tujuan utama program MPLIK.

f. Faktor Penghambat Pelaksanaan Program MPLIK

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa hambatan atau kendala dalam pelaksanaan program MPLIK di Kabupaten Klaten yaitu:

- 1) Koneksi internet yang buruk. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah dengan menggunakan modem atau laptop hanya dinyalakan sebanyak dua buah. Namun, dengan solusi seperti ini tidak banyak membantu, dan minat masyarakat terhadap MPLIK menjadi rendah.
- 2) Tidak adanya aturan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis MPLIK
- 3) Tidak ada dukungan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten terbukti dengan tidak dilakukannya kerjasama atau koordinasi.

- 4) Wilayah Kabupaten Klaten yang luas, sehingga MPLIK yang berjumlah enam buah tidak mampu mengakomodasi seluruh wilayah pelosok di Kabupaten Klaten.
- 5) Terbatasnya sumber daya manusia di dalam manajemen PT BUEP Kabupaten Klaten. Sehingga koordinator cabang PT BUEP Klaten merangkap sebagai koordinator cabang di wilayah Kabupaten Salatiga dan Boyolali. Sehingga MPLIK Kabupaten klaten dapat dikatakan terbengkalai
- 6) Terbatasnya sumber daya manusia dalam pengoperasionalan MPLIK, terbukti dari pegawai operator yang juga merangkap sebagai *driver*
- 7) Hambatan secara finansial, dilihat dari sudah tidak teraturnya pembiayaan baik untuk operasional MPLIK maupun gaji pegawai

## **B. Pembahasan**

Program MPLIK merupakan program dari Kementrian Komunikasi dan Informasi yang memiliki tujuan memberikan layanan internet bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau pelosok. Internet saat ini sudah merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat luas, oleh sebab itu pemerintah berharap dengan adanya program MPLIK ini masyarakat pelosok memiliki kesempatan yang sama dengan masyarakat kota dalam hal teknologi informasi. Masyarakat pelosok nantinya dapat dengan mudah menerima berbagai informasi yang akan menunjang taraf

hidupnya. Sasaran program MPLIK yaitu masyarakat pelosok yang rata-rata tinggal di daerah perbatasan.

Suatu program pemerintah pasti memiliki landasan hukum. Landasan hukum dapat diartikan peraturan baku sebagai tempat terpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Dalam hal ini program MPLIK berdasarkan pada landasan hukum Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor.19/Per/M.Kominfo/12/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor.48/Per/M.Kominfo/11/2009 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan *Universal* Telekomunikasi Internet Kecamatan. Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan program MPLIK harus didasarkan pada prinsip keadilan dalam memberikan layanan internet untuk memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara indonesia dalam hal penyediaan akses internet dan penerimaan informasi.

Dalam penyelenggaraan kebijakan publik, pemerintah memberikan kesempatan bagi swasta untuk berperan dalam pengelolaannya. Pemerintah memandang bahwa dengan dilimpahkannya kepada sektor swasta, pengelolaan dan hasil yang akan dicapai akan lebih optimal. Pelayanan yang diberikan suatu program yang dikelola pemerintah kadang kurang memuaskan dibandingkan dengan program yang dikelola oleh swasta. Hal tersebut dibuktikan dalam berhasilnya pengelolaan di sektor pariwisata yang diswastakan dalam pengelolaannya. Seperti halnya dalam

program MPLIK, pengelolaan dilimpahkan kepada perusahaan pemenang tender yakni PT Jogja Digital dan di Kabupaten Klaten dilimpahkan kepada PT BUEP sebagai anak cabang dari perusahaan PT Jogja Digital.

Pelaksanaan program MPLIK menjadi tanggungjawab implementor program. Program MPLIK melibatkan perusahaan pihak ketiga yang telah memenangkan tender. Sehingga dalam pelaksanaannya, program MPLIK dijalankan atau dikelola sepenuhnya oleh perusahaan swasta. Dalam hal ini PT Jogja Digital merupakan perusahaan pemenang tender yang mengelola MPLIK di wilayah Jawa Tengah dan DIY. Suatu program yang melibatkan peran serta swasta harusnya disertai dengan regulasi atau aturan yang jelas agar dapat meminimalisir permasalahan-permasalahan, mengingat dalam hal ini pelaksanaan program MPLIK berkaitan dengan berbagai aspek, antara lain teknologi, transportasi, akomodasi, sumber daya manusia, dan masyarakat itu sendiri. Di sisi lain, adanya upaya untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas merupakan suatu tuntutan agar program MPLIK dapat berhasil dalam mencapai tujuannya.

Untuk menjamin terlaksananya program MPLIK yang akuntabel dengan mengedepankan kepentingan masyarakat luas khususnya di daerah terpencil, diperlukan adanya lembaga pengawas mandiri yang bertugas melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap aktivitas MPLIK. Serta dapat memberikan pertimbangan untuk penyempurnaan Pelaksanaan program MPLIK.

Pelayanan diwujudkan dalam bentuk pemberian layanan informasi melalui teknologi informasi atau internet. Peran masyarakat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem dan manajemen pelaksanaan program MPLIK. Untuk terlaksananya partisipasi masyarakat yang baik diperlukan aturan-aturan yang jelas.

Untuk memberikan perbaikan kualitas pelayanan bagi masyarakat, maka diperlukan adanya evaluasi dalam pelaksanaannya. Hal ini bertujuan agar dalam pelaksanaannya, permasalahan yang timbul dapat teratasi dan program MPLIK semakin baik kedepannya serta meminimalisir adanya permasalahan-permasalahan yang sudah terjadi di masa lampau.

Menurut Surjadi (2009: 12-13) asas-asas umum pemerintahan yang baik menjelaskan prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan publik yang pertama yakni perihal kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, maka menjamin terselenggaranya pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat. Kebijakan pemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan yang ditempuh. Program MPLIK memiliki tujuan melayani masyarakat terpencil dalam hal kebutuhan akses internet. Namun tidak ada kepastian hukum yang menjamin dan mengatur pengelolaan program MPLIK dan menyebabkan pengalihan fungsi MPLIK itu sendiri, sehingga tujuan utama program MPLIK tidak tercapai.

Kedua, keterbukaan. Keterbukaan pelayanan program MPLIK di Kabupaten Klaten sudah cukup baik. Pelayanan yang diberikan dalam hal internet di daerah terpencil mudah diakses. Warga masyarakat hanya perlu mendatangi MPLIK dan dapat langsung menggunakan internet. Permintaan pelayanan MPLIK juga dengan prosedur yang mudah. Instansi perkantoran atau pendidikan hanya perlu melakukan ijin atau mengajukan proposal kepada PT BUEP untuk didatangkan MPLIK.

Ketiga, partisipatif. Tidak ada peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan program MPLIK di Kabupaten Klaten ini. Peran serta masyarakat dibutuhkan dalam hal pengawasan atau *controlling*. Namun dalam pelaksanaannya, banyak masyarakat di Kabupaten Klaten tidak mengetahui keberadaan MPLIK dan tujuannya. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat luas. Oleh sebab itu dapat dikatakan peran serta masyarakat dalam hal penyelenggaraan program MPLIK di Kabupaten Klaten sangat minim.

Keempat, akuntabilitas. Penyelenggaraan pelayanan publik yang bertanggung jawab. Prinsip akuntabilitas terutama berkaitan erat dengan pertanggung jawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan atau program yang telah ditetapkan itu. Media akuntabilitas yang memadai dapat berbentuk laporan yang dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi, karena pencapaian tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi. Media akuntabilitas lain yang

cukup efektif dapat berupa laporan tahunan tentang pencapaian tugas pokok dan fungsi dan target-target serta aspek penunjangnya seperti aspek keuangan, aspek sarana dan prasarana, aspek sumber daya manusia dan lain-lain. Publik mempunyai hak untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pihak yang mereka beri kepercayaan. Dalam program MPLIK, laporan-laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban awalnya dilakukan. Namun pelaporan tersebut hanya diberikan kepada PT Jogja Digital. Pertanggungjawaban dalam bentuk laporan seharusnya diberikan juga kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, sebagai instansi pemerintah yang memiliki hubungan erat dengan program MPLIK. Laporan yang dilaksanakan kepada PT Jogja Digital tidak lagi dilaksanakan sejak perubahan manajemen, dimana PT Jogja Digital sudah melepas dan menyerahkan seluruh pengelolaan MPLIK kepada PT BUEP. Laporan rutin sebagai bentuk pertanggungjawaban yang seharusnya tetap dilakukan oleh operator terhadap kantor PT BUEP juga tidak dilaksanakan.

Kelima, kepentingan umum. Program MPLIK di Kabupaten Klaten tidak mengutamakan kepentingan publik. Pelaksanaannya, MPLIK yang dikelola PT BUEP menjadi sarana pembayaran pajak *online* perusahaan pengelola yang bersifat *profit oriented*. Sehingga dalam hal ini kepentingan publik bukan merupakan fokus utama dalam pelaksanaan program.



Keenam profesionalisme, penyelenggara pelayanan memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya. Dalam penyelenggaraan program MPLIK dicanangkan oleh KEMKOMINFO dan dilimpahkan kepada beberapa perusahaan telekomunikasi sebagai pengelolaannya. Penyelenggara dan pengelola memiliki kompetensi yang sesuai di bidang sarana telekomunikasi dan informasi. Sehingga dapat dikatakan penyelenggara pelayanan MPLIK profesional. Selain itu, MPLIK di Kabupaten Klaten yang dilaksanakan oleh PT BUEP melakukan perekrutan pegawai yang juga kompeten di bidang teknologi informasi. Selain profesionalisme, pegawai MPLIK yaitu *driver* dan operator juga harus menjunjung tinggi nilai-nilai dan integritas sebagai pegawai dalam melayani masyarakat tidak hanya berorientasi pada pendapatan atau gaji.

Ketujuh, kesamaan hak. Pelayanan publik tidak diskriminatif. Pelayanan MPLIK yang diberikan kepada masyarakat di Kabupaten Klaten dapat dikatakan diskriminatif. Awalnya MPLIK berkeliling di tempat-tempat terpencil yang jauh dari kota. Namun, lama-kelamaan MPLIK dapat dijumpai di pusat-pusat kota, karena fungsi MPLIK yang beralih menjadi sarana pembayaran *online* sehingga MPLIK berhenti pada *spot-spot* yang ramai. Hal ini dikarenakan masyarakat kota yang rata-rata memiliki status sosial yang lebih tinggi daripada masyarakat pedesaan atau terpencil akan lebih menguntungkan. Sehingga MPLIK sebagai sarana pembayaran pajak *online* lebih sering ditemui di pusat-pusat kota.

Keseimbangan hak dan kewajiban. Hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima layanan. Dalam program MPLIK di Kabupaten Klaten, kewajiban pemberi layanan tidak dilaksanakan. Kewajiban pemberi layanan MPLIK yaitu memberikan fasilitas akses internet di wilayah-wilayah terpencil. Namun saat ini pemberian fasilitas internet pada daerah terpencil sudah bukan lagi menjadi fokus utama pelaksanaan MPLIK di Kabupaten Klaten. Oleh sebab itu, kewajiban tidak dilaksanakan oleh pengelola MPLIK. Sementara hak pengelola MPLIK berupa gaji tetap terpenuhi.

Oleh sebab itu, terkait dengan teori yang dikemukakan dalam Surjadi (2009: 12-13) program MPLIK di Kabupaten Klaten tidak memenuhi semua komponen dalam asas-asas pemerintahan yang baik. hal inilah yang membuat program MPLIK di Kabupaten Klaten tidak berjalan secara efektif.

Internet telah menghubungkan manusia dengan manusia lain walaupun berada di ruang dan waktu yang berbeda. Internet merupakan salah satu faktor dari lahirnya globalisasi yang saat ini tidak mampu lagi dibendung. Internet telah melahirkan *Online Community* (masyarakat dalam jaringan) dimana masyarakat tersebut terhubung satu sama lain kapanpun dan dimanapun. Komunikasi tatap muka menjadi berkurang karena manusia senantiasa terhubung dengan jaringan internet melalui peralatan elektronik yang ada di genggamannya.

Internet sebagai produk dari program MPLIK memiliki berbagai fasilitas yang ada dalam internet seperti yang dipaparkan Purnomo dan Zachariast (2005). Fasilitas-fasilitas tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat terpencil dalam berbagai bidang. Dalam pelaksanaannya, fasilitas MPLIK yang paling banyak digunakan oleh masyarakat adalah *world wide web*, e-mail, FTP dan *chatting*. Dimana penggunaan fasilitas WWW biasanya digunakan untuk menuju perangkat *search engines* (mesin pencari) yang dapat digunakan untuk mencari segala informasi yang dibutuhkan. WWW juga sering digunakan sebagai layanan untuk menuju laman media sosial yang saat ini sudah menjadi gaya hidup. Selain itu fasilitas yang sering digunakan masyarakat Kabupaten Klaten adalah *e-mail* sebagai media komunikasi berbentuk surat elektronik, FTP sebagai fasilitas *download* dan unggah, dan *chatting* yaitu layanan komunikasi atau dialog yang dilakukan secara tertulis. Fasilitas tersebut dapat dengan mudah diakses dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat penerima layanan MPLIK, misalnya siswa sekolah yang dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan akademis dan memperoleh hiburan.

Dalam penyelenggaraan MPLIK di Kabupaten Klaten, banyak permasalahan muncul yang harus segera ditemukan solusinya. Permasalahan tersebut yaitu payung hukum yang lemah sehingga terjadi pengalihan fungsi utama MPLIK menjadi sarana bisnis *profit oriented*, kurangnya koordinasi dan sosialisasi, kurangnya Sumber Daya Manusia, dan lemahnya pengawasan dan monitoring. Permasalahan tersebut

mengakibatkan tujuan program MPLIK tidak tercapai dan manfaatnya tidak dapat dirasakan masyarakat luas. Tujuan program MPLIK di Kabupaten Klaten yang tidak tercapai memperlihatkan bahwa kewajiban pemerintah menyelenggarakan pelayanan komunikasi dan informatika sebagai program yang termasuk dalam Kajian Efektifitas Program Pendampingan Pemanfaatan Layanan KPU/USO tidak terselenggara dengan baik.

Dalam melakukan evaluasi, peneliti menyusun kriteria terlebih dahulu. Kriteria diartikan sebagai patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur. Dalam evaluasi program MPLIK di Kabupaten Klaten, kriteria ketercapaian suatu program berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan. Kriteria ini perlu disusun sebagai pedoman melakukan evaluasi program.

Evaluasi dibutuhkan dalam setiap kegiatan yang memiliki tujuan tertentu. Evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan program MPLIK bertujuan untuk mengumpulkan informasi, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dan membandingkannya dengan indikator evaluasi kemudian hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi. Hasil yang diperoleh dari evaluasi yang peneliti lakukan dengan menggunakan model evaluasi CIPP yang dikembangkan oleh Stufflebeam dan Guba menunjukkan banyaknya indikator keberhasilan program yang tidak tercapai.

Aspek konteks mencakup masalah yang berkaitan dengan kondisi lingkungan program atau kondisi obyektif yang akan dilaksanakan serta relevansi program dengan pihak-pihak (*stakeholders*) yang terlibat di dalam pelaksanaan program. Pada aspek konteks ini akan dilihat tiga komponen yang terlibat dalam pelaksanaan program yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, PT BUEP Klaten selaku pengelola, dan masyarakat penerima layanan program.

Analisis input meliputi analisis personal yang berhubungan dengan bagaimana penggunaan sumber daya yang tersedia, manajemen dan strategi yang harus dipertimbangkan untuk mencapai suatu program. Aspek input memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan suatu program. Oleh karena itu evaluasi input dalam hal ini mencakup dari segi ketersediaan sarana prasarana serta fasilitas yang akan mendukung ketercapaian suatu program.

Evaluasi aspek proses lebih menekankan dan melihat bagaimana efektivitas pelaksanaan program MPLIK di Kabupaten Klaten baik dalam ketepatan pelaksanaan, ketepatan sasaran, tahap perencanaan, persiapan, sosialisasi, monitoring dan yang lebih penting adalah pada pelaksanaan program MPLIK itu sendiri. Pada aspek proses inilah dapat diketahui permasalahan dan dampak yang muncul dengan adanya program MPLIK.

Proses evaluasi produk merupakan penilaian yang dilakukan guna untuk melihat ketercapaian atau keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dari tahapan proses

evaluasi sebelumnya dapat dilihat bahwasanya dalam pelaksanaan program MPLIK di Kabupaten Klaten belum dapat terlaksana dengan baik. Ketercapaian tujuan pelaksanaan program tidak terlaksana dengan baik dimana pelayanan akses internet yang diberikan kepada masyarakat pelosok dalam proses sosialisasi program, pelayanan, pemberian sarana dan prasarana, dan pelaksanaannya itu sendiri tidak maksimal dan pelaksanaannya pun tidak sesuai dengan perencanaan yang sudah disepakati sebelumnya.

Evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan program MPLIK di Kabupaten Klaten memiliki manfaat dan fungsi yang sesuai dengan yang telah dipaparkan Dunn (2000). Evaluasi yang peneliti lakukan telah memberikan informasi mengenai kinerja kebijakan, memberikan kritik dan sumbangan berupa rekomendasi. Evaluasi ini digunakan untuk perbaikan dan pengembangan program MPLIK di Kabupaten Klaten sesuai dengan fungsi normatif yang dikemukakan Farida Yusuf Tayibnapi (2008: 4).

Dari fakta yang ditemukan di lapangan, hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian relevan yang dipilih pada bab II. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dodi Radesa di Kotamadya Bukittinggi terjadi kesamaan hasil yaitu “Implementasi Sistem Tata Kelola MPLIK di Kotamadya Bukittinggi” belum terlaksana dan berjalan secara optimal dengan berbagai kelemahan yang meliputi lemahnya regulasi yang tidak melibatkan Pemda setempat, tidak adanya koordinasi antar *stakeholders*, keterbatasan sarana penunjang, kecepatan loading internet yang buruk,

tidak adanya perda tentang MPLIK”. Perbedaan yang dapat diketahui yakni di Kotamadya Bukittinggi pemanfaatan MPLIK tidak ditumpangi dengan kegiatan pembayaran pajak *online*. Hal ini disebabkan pihak ketiga selaku pengelola MPLIK di wilayah Sumatera dan Jawa juga berbeda.

Berbagai permasalahan dalam pelaksanaan MPLIK menjadi tanggungjawab implementor untuk dapat menemukan solusi khususnya pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan. Dengan pelaksanaan yang jauh dari harapan, program MPLIK sebaiknya dapat dilanjutkan dengan perbaikan, mengingat kebutuhan masyarakat daerah terpencil dalam hal akses internet belum dapat terpenuhi. Perbaikan yang dilakukan dimulai dengan pembuatan regulasi atau aturan yang tegas mengenai pelaksanaan MPLIK.